

PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2019
BAGIAN ANGGARAN 005.01
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



Jl. Pelita I, Pringsewu Timur,
Pringsewu - Lampung 35373
Telp. (0729) 7082841.
Web. Pa-pringsewu.go.id.
e-mail : Papringsewu@gmail.com.

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Pringsewu adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pringsewu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Pringsewu. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pringsewu, 02 Juli 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

TRI JOKO SULISTOMO, S.H.
NIP.198112092006041003

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
Pernyataan Tanggung Jawab	5
Ringkasan Laporan Keuangan	6
I. Laporan Realisasi Anggaran	8
II. Neraca	9
III. Laporan Operasional	10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	12
A. Penjelasan Umum;	12
A.1. Dasar Hukum;.....	12
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Pringsewu;	13
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan;	14
A.4. Basis Akuntansi;	14
A.5. Dasar Pengukuran;.....	14
A.6. Kebijakan Akuntansi;.....	15
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran;.....	22
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah;.....	22
B.2. Belanja;	23
B.3. Belanja Pegawai;	24
B.4. Belanja Barang;	25
B.5. Belanja Modal;	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca;	26
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional;	33
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak;.....	33
D.2. Beban Pegawai;.....	33
D.3. Beban Persediaan;	33
D.4. Beban Jasa;.....	34
D.5. Beban Pemeliharaan;.....	34
D.6. Beban Perjalanan Dinas;	35
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat;	35

D.8.	Beban Bantuan Sosial;.....	35
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi;	35
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih;	36
D.11.	Beban Lain-lain;.....	36
D.12.	Kegiatan Non Operasional;	36
D.13.	Pos Luar Biasa;	36
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas;.....	37
E.1.	Ekuitas Awal;	37
E.2.	Surplus (defisit) LO;.....	37
E.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar;	37
E.3.1.	Penyesuaian Nilai Aset;.....	37
E.3.2.	Koreksi Nilai Persediaan;.....	37
E.3.3.	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi;.....	37
E.4.	Transaksi Antar Entitas;	37
E.5.	Ekuitas Akhir;	38
F.	Pengungkapan Penting Lainnya;	39
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca;	39
F.2.	Pengungkapan Lain-lain;	39
V.	Lampiran dan Daftar.....	40

Pengadilan Agama Pringsewu

Jl. Pelita I, Pringsewu Timur, Pringsewu - Lampung 35373

Telp. (0729)7082841, Web. Pa-pringsewu.go.id, e-mail :Papingsewu@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pringsewu yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Periode 30 Juni Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pringsewu telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pringsewu, 02 Juli 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

TRI JOKO SULISTOMO, S.H.
NIP.198112092006041003

Ringkasan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pringsewu Periode 30 Juni Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN;

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Anggaran (DIPA) TA 2019 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan – LRA dan belanja selama periode 1 Januari 2019 s.d. 30 Juni 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.1.665.000 mencapai 0,00 persendari estimasi pendapatannya sebesar Rp.0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp.1.183.287.951 atau mencapai 52,35 persendari alokasi anggaran sebesar Rp.2.260.363.000.

2. NERACA;

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2019. Nilai Aset per 30 Juni 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp.485.175.344, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.15.267.500; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar Rp.15.000.000. dan Rp.470.175.344.

3. LAPORAN OPERASIONAL;

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.0. sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.933.476.550. sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(933.476.550). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.1.570.000. dan sebesar Rp.0. sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(931.906.550).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS;

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp.0. dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.(931.906.550). ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0. dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.1.402.081.894. sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2019 adalah senilai Rp.470.175.344.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN;

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2019		% thd Angg	TA 2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	1,665,000	0	0
JUMLAH PENDAPATAN		0	1,665,000	0	0
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	1,516,953,000	724,835,456	47.78	0
Belanja Barang	B.4	319,910,000	159,228,995	49.77	0
Belanja Modal	B.5	423,500,000	299,223,500	70.65	0
JUMLAH BELANJA		2,260,363,000	1,183,287,951	52.35	0

* Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU
NERACA
PER 30 JUNI 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	1,500,000	0
Belanja Dibayar di Muka	C.2	0	0
Persediaan	C.3	267,500	0
Jumlah Aset Lancar		1,767,500	0
ASET TETAP			
Tanah	C.4	0	0
Peralatan dan Mesin	C.5	558,635,425	0
Gedung dan Bangunan	C.6	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.7	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.8	0	0
Konstruksi dalam pengerjaan	C.9	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.10	(88,727,581)	0
Jumlah Aset Tetap		469,907,844	0
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.11	0	0
Aset Lain-Lain	C.12	0	0
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.13	0	0
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		485,175,344	0
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.14	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.15	15,000,000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		15,000,000	0
JUMLAH KEWAJIBAN		15,000,000	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.16	470,175,344	0
JUMLAH EKUITAS		470,175,344	0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		485,175,344	0

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	0	0
JUMLAH PENDAPATAN		0	0
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	724,835,456	0
Beban Persediaan	D.3	4,725,500	0
Beban Barang dan Jasa	D.4	81,346,580	0
Beban Pemeliharaan	D.5	54,436,415	0
Beban Perjalanan Dinas	D.6	18,358,000	0
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	49,774,599	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	0
JUMLAH BEBAN		933,476,550	0
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(933,476,550)	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1,665,000	0
Beban dari kegiatan non operasional lainnya		95,000	0
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1,570,000	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(931,906,550)	0
POS LUAR BIASA			
	D.12		
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(931,906,550)	0

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	E.1	0	0
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(931,906,550)	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	0	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	0	0
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	0	0
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	0	0
JUMLAH		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	1,402,081,894	0
EKUITAS AKHIR	E.5	470,175,344	0

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

V. Catatan Atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum;

A.1. Dasar Hukum;

Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- g. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Kota Agung;

Visi Pengadilan Agama Pringsewu adalah “*Mewujudkan Pengadilan Agama Pringsewu Yang Modern Menuju Badan Peradilan Yang Agung*”.

Misi Pengadilan Agama Pringsewu adalah :

1. Meningkatkan pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Meningkatkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain.
3. Meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan tertib administrasi dan manajemen yang transparan serta efektif dan efisien.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Pringsewu melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Pringsewu. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pringsewu adalah sebagai berikut :

1. PeningkatanPenyelesaianPerkara;
2. Peningkatanaksesibilitasmasyarakatterhadapperadilan (aces to justice);
3. Peningkatankualitassumberdayamanusia dan kinerja yang efektif dan efisien;
4. Peningkatanakuntabilitas dan tranparasiPeradilan;
5. Peningkatantertibadministrasiperkara;

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pringsewuadalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnyaaksesperadilanbagimasyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan;

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi;

Kantor menerapkan basis akruaI dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran;

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi;

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Pringsewu adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA;

Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO;

Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3.) Belanja;

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban;

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset;

Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar;

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat

peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap;

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (*satujutarupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (*duapuluh lima jutarupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
 - Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap;

Penyusutan AsetTetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan;
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang;

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya;

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6.) Kewajiban;

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek;

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang;

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7.) Ekuitas;

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran;

*Penjelasan atas
Pos-pos Realisasi
Anggaran*

Selama periode berjalan, *Pengadilan Agama Pringsewu* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan adanya perubahan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sebagai berikut :

Uraian	2019	
	Anggaran	Setelah Revisi
Belanja Barang	243,610,000	319,910,000
Belanja Modal	300,000,000	423,500,000
Jumlah	543,610,000	743,410,000

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah;

*Pendapatan
Negara
dan Hibah
Rp.1.665.000.*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp.1.665.000. atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0. Pendapatan Pengadilan Agama Pringsewu terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	1,665,000	0
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
Jumlah	0	1,665,000	0

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung & Bangunan	0	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai	1,665,000	0	0
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
Jumlah	1,665,000	0	0

*Realisasi Belanja Negara
Rp.1.183.287.951.*

B.2. Belanja;

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Pringsewu pada TA 2019 adalah sebesar Rp.1.183.287.951. setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 52,35 persen dari anggaran senilai Rp.2.260.363.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	1,516,953,000	724,835,456	47.78
Belanja Barang	319,910,000	159,228,995	49.77
Belanja Modal	423,500,000	299,223,500	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Total Belanja Kotor	2,260,363,000	1,183,287,951	52.35
Pengembalian		-	-
Jumlah	2,260,363,000	1,183,287,951	52.35

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	724,835,456	0	0
Belanja Barang	159,228,995	0	0
Belanja Modal	299,223,500	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Jumlah	1,183,287,951	0	0

B.3. Belanja Pegawai;

*Belanja Pegawai
Rp.724.835.456.*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Pringsewu per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp.724.835.456. dan Rp.0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	724,835,456	0	0
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	0
Belanja Honorarium	0	0	0
Belanja Lembur	0	0	0
Belanja Vakasi	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	724,835,456	0	0
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0
Jumlah Belanja	724,835,456	0	#DIV/0!

B.4. Belanja Barang;

*Belanja Barang
Rp.159.228.995.*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Pringsewu TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.159.228.995. dan Rp.0. Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2018;

Perbandingan Belanja Barang TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI TA 2019	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	63,033,718	0	0
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0
Belanja Barang Persediaan	5,433,000	0	0
Belanja Jasa	18,312,862	0	0
Belanja Pemeliharaan	54,091,415	0	0
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	18,358,000	0	0
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	159,228,995	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja	159,228,995	0	0

B.5. Belanja Modal;

*Belanja Modal
Rp.299.223.500.*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Pringsewu TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp.299.223.500. dan Rp.0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Belanja Modal TA 2019 dan 2018

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	299,223,500	0	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0.00
Belanja Modal BLU	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	299,223,500	0	0.00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	299,223,500	0	0

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca;

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran;

**Kas di Bendahara
Pengeluaran:
Rp.15.000.000.**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.15.000.000. dan Rp.0. yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2019 dan 2018

Keterangan	30 Juni TA 2019	TA 2018
Uang Tunai	15.000.000	0
Jumlah	15.000.000	0

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan;

**Kas di Bendahara
Penerimaan:
Rp.0.**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0. yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2019 dan 2018

Keterangan	30 Juni TA 2019	TA 2018
-	0	0
Jumlah	0	0

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas;

**Kas Lainnya dan
Setara Kas: Rp.0.**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas terdiri dari :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2019 dan 2018

Keterangan	30 Juni TA 2019	TA 2018
-	0	0
Jumlah	0	0

C.4. Belanja Dibayar di Muka;

**Belanja Dibayar
di Muka: Rp.0.**

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah di bayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

C.5. Persediaan;

**Persediaan:
Rp.267.500.**

Persediaan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.267.500. dan Rp.0.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2019 dan 2018

Jenis	TH 2019	TH 2018
Barang Konsumsi	267,500	0
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Jumlah	267,500	0

C.6. Tanah;

**Tanah:
Rp.0.**

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	0
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 Juni 2019	0

C.7. Peralatan dan Mesin;

*Peralatan dan Mesin
Rp.558.635.425.*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.558.635.425. dan Rp.0.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	0
Mutasi tambah:	
Pembelian 1 (satu) unit Mobil	256,440,000
Pembelian 2 (dua) unit Sepeda Motor	42,783,500
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Pembelian 1 (satu) buah Mesin Absensi	6,000,000
Pembelian 13 (tiga belas) buah Meja Kerja Kayu	100,870,400
Pembelian 10 (sepuluh) buah Kursi Besi/Metal	24,345,600
Pembelian 4 (empat) buah Kursi Kayu	14,784,000
Pembelian 3 (tiga) buah A.C. Split	15,000,000
Pembelian 3 (tiga) buah P.C. Unit	27,588,000
Pembelian 2 (dua) buah Laptop	26,000,000
Pembelian 3 (tiga) buah Printer	4,823,925
Pembelian 1 (satu) buah Server	40,000,000
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 30 Juni 2019	558,635,425
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2019	(88,727,581)
Nilai Buku per 30 Juni 2019	469,907,844

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.8. Gedung dan Bangunan;

Gedung dan Bangunan : Rp.0.

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0. Tidak ada mutasi tambah atau pengurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2019, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	0
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
	0
Saldo per 30 Juni 2019	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2019	0
Nilai Buku per 30 Juni 2019	0

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.9. Jalan , Irigasi, dan Jaringan;

Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan : Rp.0.

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0. Tidak ada mutasi tambah atau pengurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2019, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	0
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
	0
Saldo per 30 Juni 2019	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2019	0
Nilai Buku per 30 Juni 2019	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.10. Aset Tetap Lainnya;

Aset Tetap Lainnya: Rp.0.

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0, dan Rp.0.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	0
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
	0
Saldo per 30 Juni 2019	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2019	0
Nilai Buku per 30 Juni 2019	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.11. Konstruksi dalam Pengerjaan;

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp.0.

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0, dan Rp.0, yang merupakan pembangun gedung tempat kerja yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca;

C.12. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap;

Akumulasi Penyusutan Aset tetap Rp.[88.727.581]

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp.(88.727.581) dan Rp.(0).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2019 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2019 dan 2018*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	558,635,425	88,727,581	469,907,844
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		558,635,425	88,727,581	469,907,844

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.13. Aset Lain-lain;

*Aset Lain-lain :
Rp.0.*

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0, dan Rp.0. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Pringsewu serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	0
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
	0
Saldo per 30 Juni 2019	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2019	0
Nilai Buku per 30 Juni 2019	0

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya: Rp.0

C.14. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya;

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Software	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.15. Utang kepada Pihak Ketiga;

Utang Kepada Pihak Ketiga: Rp.0.

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Pengadilan Agama Pringsewu per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
-	0	-
Total	-	

C.16. Ekuitas;

Ekuitas Rp.470.175.344.

Ekuitas per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.470.175.344. dan Rp.0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional;

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak;

**Pendapatan
PNbp : Rp.0.**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2019 dan 2018

URAIAN	T.A. 2019	T.A. 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung & Bangunan	0	0	0
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
Jumlah	0	0	0

D.2. Beban Pegawai;

**Beban Pegawai :
Rp. 724.835.456.**

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.724.835.456. dan Rp.0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai TA 2019 dan TA 2018

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	330,454,040	0	0
Beban Tunjangan-tunjangan	394,381,416	0	0
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	0
Beban Lembur	0	0	0
Jumlah	724,835,456	0	0

D.3. Beban Persediaan;

**Beban Persediaan :
Rp.4.725.500.**

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.4.725.500. dan Rp.0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2019 dan TA 2018

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	4,725,500	0	0
Beban Persediaan bahan baku	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0
Jumlah	4,725,500	0	0

D.4. Beban Jasa;

Beban Jasa :
Rp.81.346.580.

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.81.346.580. dan Rp.0. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2019 dan TA 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	46,846,718	0	0
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	287,000	0	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	15,900,000	0	0
Beban Langganan Listrik	5,015,000	0	0
Beban Langganan Telepon	797,862	0	0
Beban Sewa	12,500,000	0	0
Belanja Modal BLU	0	0	#DIV/0!
Jumlah	81,346,580	0	0

D.5. Beban Pemeliharaan;

Beban Pemeliharaan
Rp.54.436.415.

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.54.436.415. dan Rp.0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2019 dan TA 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	37,992,000	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16,099,415	0	0
Beban Pemeliharaan Lainnya	345,000	0	0
Jumlah	54,436,415	0	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas;

Beban Perjalanan Dinas :
Rp.18.358.000.

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.18.358.000. dan Rp.0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2019 dan TA 2018

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	18,358,000	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0.00
Jumlah	18,358,000	0	0.00

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat;

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat :
Rp.0.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016.

D.8. Beban Bantuan Sosial;

Beban Bantuan Sosial :
Rp.0.

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi;

Beban Penyusutan dan Amortisasi :
Rp.49.774.599.

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.49.774.599. dan Rp.0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2019 dan TA 2018*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	49,774,599	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah Penyusutan	49,774,599	0	0
Beban Amortisasi	0	0	0
Beban Penyusutan aset lain-lain	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	49,774,599	0	0

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih;

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp.0 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0.

D.11. Beban Lain-lain;

Beban Lain-Lain : Rp.0. Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0, Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12. Kegiatan Non Operasional;

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp.1.570.000. Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.1.570.000. dan Rp.0. Pos Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2019 dan 2018

URAIAN	TH 2019	TH 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya *)	1,665,000	0	0.00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan *)	(95,000)	0	0.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	1,570,000	0	0.00

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

D.13. Pos Luar Biasa;

Beban Pos Luar Biasa : Rp.0. Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas;

E.1. Ekuitas Awal;

Ekuitas Awal: Rp.0.

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0.

E.2. Surplus (defisit) LO;

Surplus (defisit) LO: Rp.(931.906.550).

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp.(931.906.550). dan Rp.0. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar;

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset;

Penyesuaian Nilai Aset Rp.0.

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan;

Koreksi Nilai Persediaan Rp.0.

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0.

E.3.3. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi;

Koreksi Nilai Persediaan Rp.0.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0, Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.4. Transaksi Antar Entitas;

Transaksi Antar Entitas Rp.1.402.081.894.

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.1.402.081.894. dan Rp.0. Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari :

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas TA 2019

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(1,665,000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	1,183,287,951
Transfer Masuk	220,458,943
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	1,402,081,894

E.5. Ekuitas Akhir;

Ekuitas Akhir
Rp.470.175.344.

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.470.175.344. dan Rp.0.

F. Pengungkapan Penting Lainnya;

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca;

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain;

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua;l

Tidak terdapat Informasi Pendapatan & Belanja Secara Akrua;l pada Kantor Pengadilan Agama Pringsewu.

F.2.3. Rekening Pemerintah;

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Pringsewu adalah:

1. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PRINGSEWU 7125655852 a.n. BPG 017 PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp.0.
2. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PRINGSEWU 7125775696 a.n. BPG 017 PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp.0.
3. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PRINGSEWU 6444440005 a.n. RPL 017 PDT PA PRINGSEWU yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp.38.859.439,52.

F.2.4. Revisi DIPA;

Diinformasikan bahwa revisi pada DIPA TA 2019 pada satuan kerja Kantor Pengadilan Agama Pringsewu telah dilakukan sebanyak 2 kali dimana Revisi I tentang Perubahan Pejabat Perbendaharaan tanggal 30 Januari 2019, dan Revisi II tentang penambahan anggaran PA BUN tanggal 29 Mei 2019;

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB;

Tidak terdapat permintaan koreksi data dan Ralat pada satuan kerja Pengadilan Agama Pringsewu;

F.2.6. Catatan Penting Lainnya;

Tidak terdapat catatan penting lainnya.

PENGADILAN AGAMA PRINGSEWU
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2019

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		30-06-2019	Tahun 2019	Per 30-06-2019	Per 30-06-2018
A	Tanah						
1	Tanah	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0	0
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Bantu	0	0	0	0	0	0
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	3	299,223,500	0	21,373,108	21,373,108	277,850,392
3	Alat Bengkel Tak Bermesin	0	0	0	0	0	0
4	Alat Kantor	1	6,000,000	600,000	600,000	1,200,000	4,800,000
5	Alat Rumah Tangga	30	155,000,000	17,000,000	15,500,000	32,500,000	122,500,000
6	Alat Studio	0	0	0	0	0	0
7	Alat Komunikasi	0	0	0	0	0	0
8	Peralatan Pemancar	0	0	0	0	0	0
9	Alat Laboratorium / Elektronika	0	0	0	0	0	0
10	Komputer Unit	5	53,588,000	10,147,000	6,698,500	16,845,500	36,742,500
11	Peralatan Komputer	4	44,823,925	11,205,982	5,602,991	16,808,973	28,014,952
	Jumlah	43	558,635,425	38,952,982	49,774,599	88,727,581	469,907,844
C	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	0	0	0	0	0
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0	0	0	0	0	0
3	Tugu/Tanda Batas	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0	0
D	Jalan, Irigasi dan Jaringan						
1	Jalan	0	0	0	0	0	0
2	Bangunan Pengembangan Sumber Air	0	0	0	0	0	0
3	Instalasi Air Bersih	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0	0
E	Konstruksi Dalam Pengerjaan						
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0	0
F	Aset Tetap Lainnya						
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	0	0	0	0	0	0
2	Barang Bercorak Kesenian	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	-	0	0	0
	Aset Tetap yang tidak digunakan						
1	Komputer Unit	0	0	0	0	0	0
2	Peralatan Komputer	0	0	0	0	0	0
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	0	0	0	0	0
4	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0	0
	Total		558,635,425	38,952,982	49,774,599	88,727,581	469,907,844